

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ainun Rafiq al-Amin, (2012). *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.
- Arief, Furchan. (2004). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Badudu-Zain, (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan, (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Herdiansah, Ari Ganjar, (2016). “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Sosioglobal*, Vol. 1 No. 1, Desember.
- Hizbut Tahrir, (1983). *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2009). M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Max Weber, (1964). *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M. Handerson and Talcott Parsons, New York: Free Press.
- Moh. Mahfud MD, (2015). *Pergulatan Potitik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Jakarta, 1999. Mohamad Rafiudin, “Mengenal Hizbut Tahrir”, *Islamuna* Vol. 2 No. 1.
- Muhammadin, (2016). “Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern”, *Intizar* Vol. 22, No. 2.
- Nilda Hayati, (2017). “Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia”, *Episteme*, Vol 12 No. 1, Juni.
- Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revisi ededition, N.P. Engel, Publishers, hlm. 496-497.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, (2005). “*Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, (*Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 20 No. 1, Januari-Februari).
- Rosi Selly, (2008). “Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir”, *Skripsi Program S1 Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*.

Soekanto, Soerjono, (1977), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Sondang P. Siagian, (1980). *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

Sukmadinata, (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara.

Wibowo, Catur dan Herman Harefa, (2015). “Urgensi Penagwasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah”, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. 1, 2015.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.

Internet/Website:

Eryanto Nugroho, “Pembubaran HTI dan Kebebasan Berserikat”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59126dc010537/pembubaran-hti-dan-kebebasan-berserikat-oleh--eryanto-nugroho>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

“FPI Ancam Gulingkan SBY” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/11/15583862/FPI.Ancam.Gulingkan.SBY>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

“Fenomena HTI (Kajian Akademis)”, dalam <https://www.kompasiana.com/alhakim/54ffa7bda33311ec4f5106ca/phenomena-hti-kajian-akademis>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

“Hizbut Tahrir, Khilafah, dan Sikap Pemerintah”, dalam <https://geotimes.co.id/kolom/hizbut-tahrir-khilafah-dan-sikap-pemerintah/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

“Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

“PTUN Tolak Gugatan HTI”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13054551/ptun-tolak-gugatan-hti>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

“Dibubarkan Pemerintah, HTI Lakukan Upaya Hukum”, <http://www.beritasatu.com/hukum/442396-dibubarkan-pemerintah-hti-lakukan-upaya-hukum.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

“Kontroversi Pembubaran HTI”, dalam <https://fokus.news.viva.co.id/indepth/fokus/913325-kontroversi-pembubaran-hti>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, HTI resmi di bubarkan pemerintah, <https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-571562/kontras-penerbitan-perppu-ormas-langkahmundur>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

<https://www.merdeka.com/politik/yusril-temukan-pasal-karet-yang-berbahaya-dalam-perppu-ormas.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

<https://www.viva.co.id/berita/politik/91357-pancasila-dan-sejarah-pembubaran-ormas-dan-partai-politik>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

